



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.07.0001
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nama Rekening : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Jumlah Anggaran (DPA) : 198,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 198,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

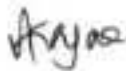
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				90,200,000.00
2	01 Agustus 2024	00473	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPKD/PA/KPA) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	2,590,000.00	87,610,000.00
3	01 Agustus 2024	00474	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPTK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	7,150,000.00	80,460,000.00
4	01 Agustus 2024	00475	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	990,000.00	79,470,000.00
5	01 Agustus 2024	00476	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (STAF/PEMBANTU PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	2,310,000.00	77,160,000.00
6	01 Agustus 2024	00477	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	860,000.00	76,300,000.00
7	01 Agustus 2024	00478	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	74,800,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	15,400,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	107,800,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	123,200,000.00	


Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
BALITBANGDA
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19130425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN


SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.07.0001

Buku Kas No. : 00474

Tanggal : 1-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPTK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001


BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 7.150.000,-

MENGETAHUI

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 1-8-2024
Yang Menerima,



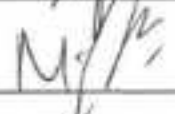
DAFTAR: BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPTK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 070.04/011/KEP/I/2024 / 08 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.01.2.02 / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0002 / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rekening : 5.1.01.03.07.0001 / Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM 48.490.171.5-813.000 Rekening : 1342010000079324	Honorarium PPTK	2.520.000	x 1		2.520.000			378.000		2.142.000	1 
2	DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si 47.273.911.9-802.000 Rekening : 1462010000007351	Honorarium PPTK	1.410.000	x 1		1.410.000			211.500		1.198.500	2 
3	MUHAMMAD AMRI, S.STP, M.A.P 49.540.106.9-804.000 Rekening : 1432010000017069	Honorarium PPTK	1.610.000	x 1		1.610.000			241.500		1.368.500	3 
4	DR. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.Si 08.264.935.1-801.000 Rekening : 1302010000435891	Honorarium PPTK	1.610.000	x 1		1.610.000			241.500		1.368.500	4 
	JUMLAH					7.150.000			1.072.500		6.077.500	

TERBILANG: TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Makassar, 1-8-2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197309252005021001

**KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SELAKU PPTK**

YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR

FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.297.298.2-804.000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT : JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MASA PAJAK : 08-08
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.072.500
TERBILANG : Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

URAIAN : Bayar Honor PPTK sub Keg Penyediaan ADM Pelaksanaan Tugas ASN
u/Bln Agustus

NPWP PENYETOR : 00.297.298.2-804.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0291 7171 3656 095
MASA AKTIF : 31/08/2024 07:32:10

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



This is a computer generated message and require no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan

DATA PEMBAYARAN :
Tanggal & Jam Bayar : 01-08-2024 13:18:36
Tanggal Buku : 01-08-2024
Kode Cabang Bank : 146000
DATA SETORAN :
Kode Billing : 029171713656095
NPWP : 002972982804000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
Alamat : JL AHMAD YANI KOTA MAKASSAR
Jumlah Deterl :
Jumlah Setoran : 1.072.500
Mata uang : IDR
Terbilang : Satu juta Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

NTB : 00000541201
NTN : 970320780066H2V
STAN : 541201



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAER
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/011/KEP/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang :
- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d) Menandatangani SPP-LS; dan
 - e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tambahan penghasilan berupa honorarium bulanan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200302 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 070.04/011/KEP/I/2024

TANGGAL : 08 JANUARI 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PPTK	PROGRAM DAN KEGIATAN
1.	Nama : YUDISTHIRA AZHARI, S.Sos, MM NIP : 19810610 201001 1 021 Pangkat/Gol. : Pembina / Iva Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji dan Tunjangan PNS dan TPP) - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO.	NAMA PPTK	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	Nama : DODY AGRIYANTO, S.Sos,M.Si NIP : 19741216 199311 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Muda TK. I / IVb Jabatan : Kabid. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

NO.	NAMA PPTK	PROGRAM DAN KEGIATAN
3.	Nama : MUHAMMAD AMRI, S.STP, M.AP NIP : 19850412 200312 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina / IVa Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
4.	Nama : DR. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si NIP : 19720716 199803 1 007 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IVb Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual


**KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR,**
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.AP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19730425 200502 1 001